

# LAPORAN KINERJA

*Lakin*



## KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG **BOGOR**

2025



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
<b>A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI .....</b>	<b>5</b>
<b>B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....</b>	<b>11</b>
1. Pengelolaan Kekayaan Negara .....	12
2. Pelayanan Penilaian .....	12
3. Pengurusan Piutang Negara .....	13
4. Pelayanan Lelang .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
<b>A. PETA STRATEGI DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>15</b>
1. Peta Strategi .....	15
2. Sasaran Strategis .....	16
<b>B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>20</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>20</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>30</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>31</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan capaian kinerja ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Bogor mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020.

Pada tahun 2025, KPKNL Bogor telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja KPKNL Bogor Tahun 2025 yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja KPKNL Bogor ini akan dibandingkan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2025 dengan Kontrak Kinerja Tahun 2025, serta penjelasan terkait kendala dan permasalahan yang terjadi.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan dapat dijadikan sebagai pedoman menenrukan kebijakan serta pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bogor, 26 Januari 2026

Plh. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Palomes

## BAB I

### PENDAHULUAN

KPKNL Bogor merupakan salah satu kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dimana dalam pasal 29 dan 30 menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Bogor berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 312/KMK.01/2011 yang terdiri dari 5 (lima) unsur nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor yang merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

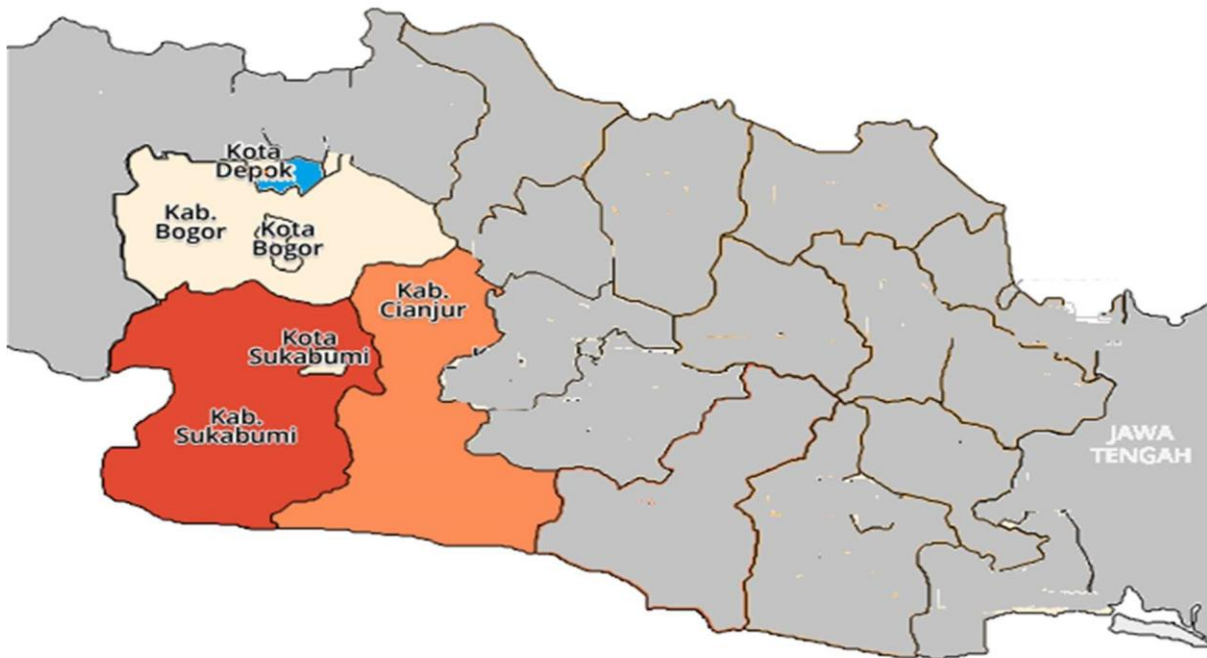
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, KPKNL Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berupaya agar tetap prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui Laporan Kinerja KPKNL Bogor Tahun 2025 ini, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah KPKNL Bogor telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas. Dan diharapkan masyarakat atau stakeholder dapat memberikan masukan kepada KPKNL Bogor demi perbaikan kinerja sehingga menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

### A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. KPKNL Bogor berlokasi di Jalan Veteran Nomor 45, tepat berada di pusat kota Bogor yang dikenal sebagai “Kota Hujan” dan dimasa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama *Buitenzorg* yang berarti “tanpa kecemasan” atau “aman tentram”. Sejarah pendirian KPKNL Bogor berawal dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Bogor dan Kantor Lelang Negara (KLN) Bogor. Kemudian KP3N Bogor dan KLN Bogor digabung menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang (KP2LN) Bogor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor memiliki wilayah kerja meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Gambar 1.1 Peta wilayah kerja KPKNL Bogor



Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor memiliki visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut.

## VISI

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

## MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, KPKNL Bogor melandasi dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu:

- **Integritas**  
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- **Profesionalisme**  
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- **Sinergi**  
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemintraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- **Pelayanan**  
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

- Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

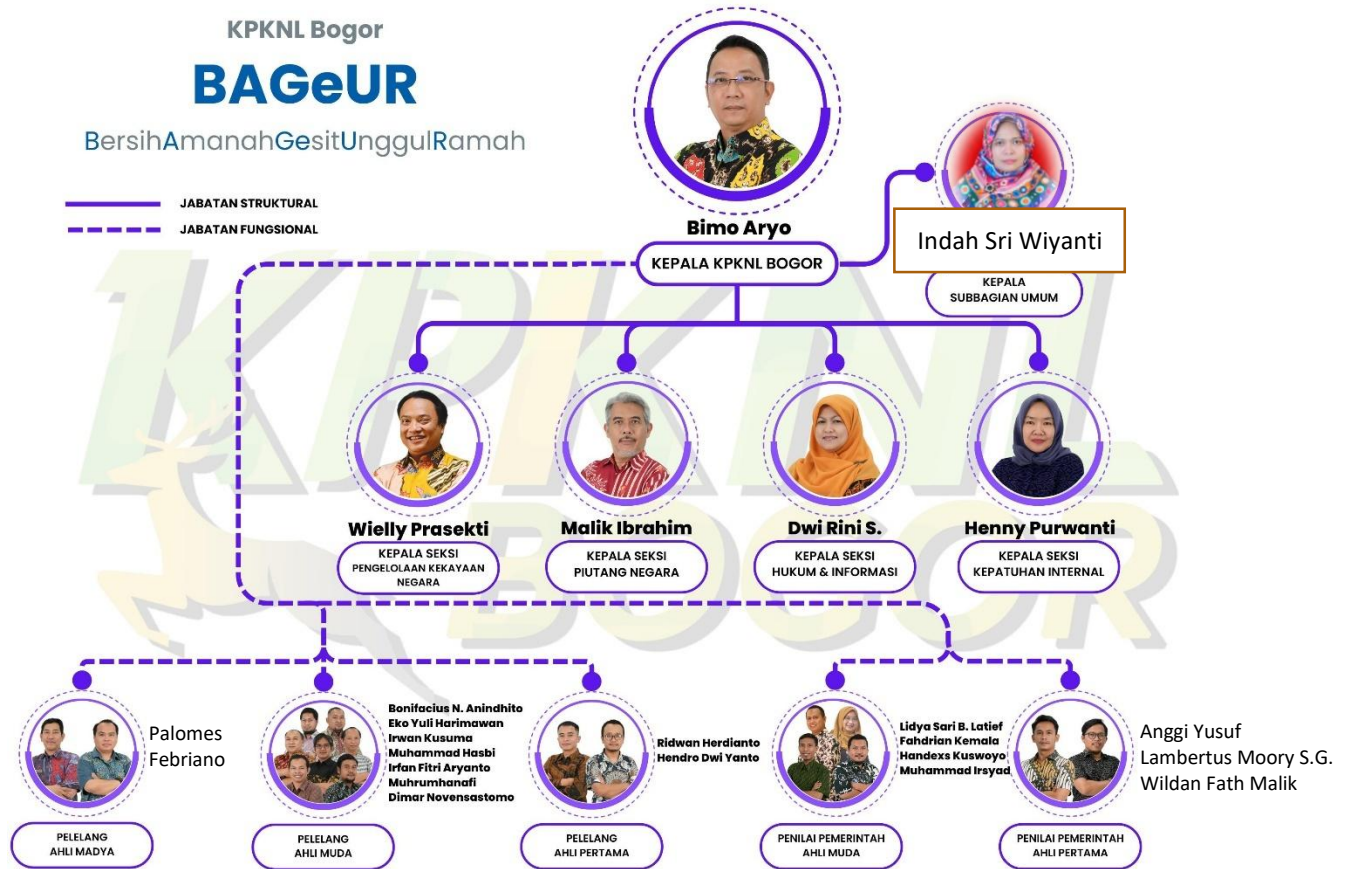
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Bogor juga memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan motto "**BAGEUR**" yaitu Bersih, Amanah, Gesit, Unggul, dan Ramah. Melalui motto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Bogor dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Adapun fungsi KPKNL Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 yaitu:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala KPKNL Bogor dibantu oleh Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum Informasi, Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi pada KPKNL Bogor sebagai berikut:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPKNL Bogor



Tugas pokok, fungsi dari setiap jabatan yang terdapat pada KPKNL Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 dijelaskan sebagai berikut:

### Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL Bogor. Formasi pegawai pada Subbagian Umum terdiri dari 1 (satu) Kepala Subbagian, 6 (enam) Pegawai Pelaksana, dan 14 (empat belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



### Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara. Formasi Seksi Pengelola Kekayaan Negara terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 5 (lima) pegawai pelaksana.

### Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Formasi Seksi Piutang Negara terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 3 (tiga) pegawai pelaksana.

### Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. Formasi Seksi Hukum dan Informasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 5 (lima) pegawai pelaksana.

### Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Formasi Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 3 (tiga) pegawai pelaksana.

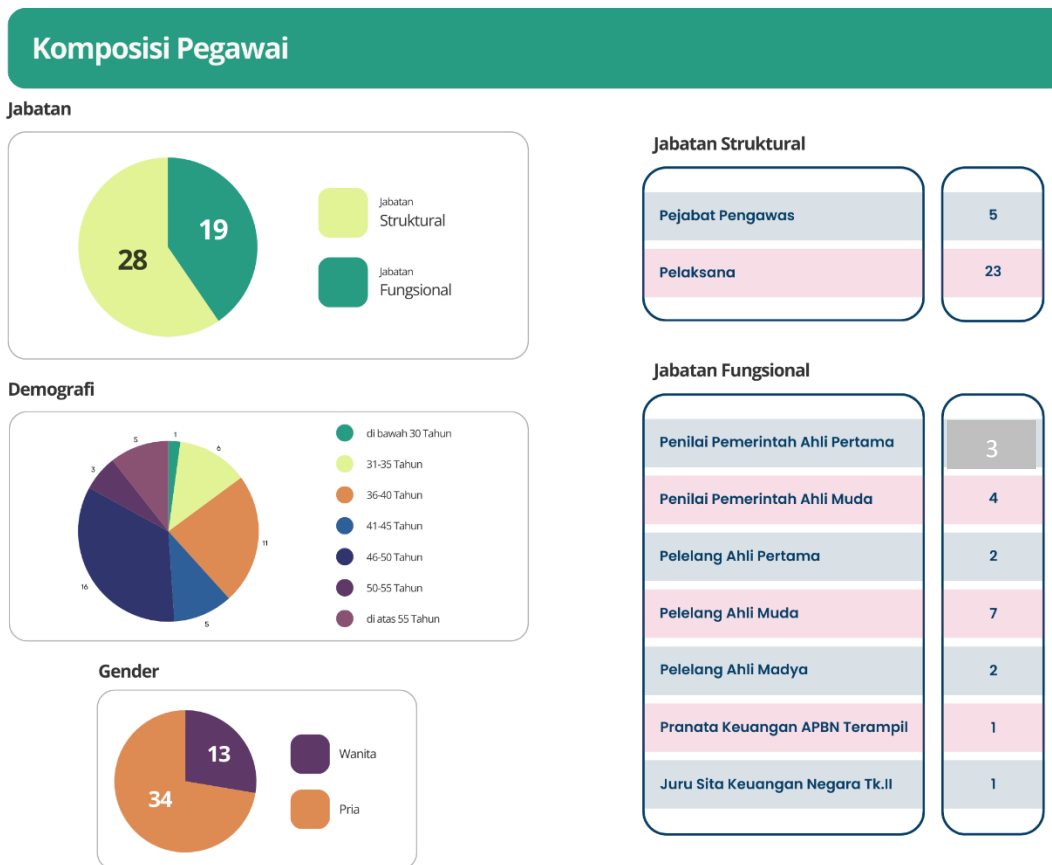
### Kelompok Jabatan Fungsional

Pada KPKNL Bogor terdapat kelompok jabatan fungsional yang dibentuk sesuai kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi KPKNL Bogor sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Formasi Kelompok Jabatan Fungsional pada KPKNL Bogor terdiri dari 2 (dua) Pelelang Ahli Madya, 7 (tujuh) Pelelang Ahli Muda, 2 (dua) Pelelang Ahli Pertama, 4 (empat) Penilai Pemerintah Ahli Muda, 3 (tiga) Penilai Pemerintah Ahli Pertama, dan 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Terampil.

Jumlah pegawai KPKNL Bogor per 31 Desember 2025 sebanyak 63 Pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 5 (lima) Kepala Seksi/Kasubbag, 18 (delapan belas) Pejabat Fungsional Ahli, 1 (satu) Pejabat Fungsional Terampil, 24 (dua puluh empat) Pegawai Pelaksana, dan 14 (empat belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Gambar 1.3 Komposisi SDM



Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPKNL Bogor mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara konsisten dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen keuangan.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPKNL Bogor menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan perubahan besar terhadap tata kelola keuangan negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai salah satu unit vertikal DJKN, KPKNL Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Bogor tidak hanya kepada stakeholder instansi pemerintah namun juga melayani masyarakat umum, misalnya dalam pelayanan di bidang lelang dan piutang negara. Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh KPKNL Bogor selalu diupayakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran strategis KPKNL Bogor dalam melakukan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

## 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Dalam melakukan pengelolaan kekayaan Negara, KPKNL Bogor mempunyai tugas terkait inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara serta registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan:

- Menghilangkan *high operational cost*.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengharmonisasikan ketentuan perundang-undangan kekayaan negara antarsektor.
- Mengetahui jumlah, keberadaan dan besaran nilai riil kekayaan negara.
- Tersusunnya Neraca Kekayaan Pemerintah dan Neraca Kekayaan Negara.
- Optimalisasi pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengatur pengurusan terhadap kekayaan negara, baik yang *existing* maupun *disposal*.
- Menghindari *dispute* antara instansi/unit pengelola kekayaan negara.

Salah satu lingkup pengelolaan kekayaan negara yaitu pengelolaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya sah. Dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan. Proses pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Satuan Kerja (Satker) yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang merupakan mitra kerja KPKNL Bogor adalah sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) Satker.

## 2. Pelayanan Penilaian

Pelayanan Penilaian pada tahun 2025 dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap:

- a. Barang Milik Negara;
- b. barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal;

- c. kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara;
- d. kekayaan negara lain-lain, dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain;
- e. barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara;
- f. penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

Penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah tersebut dilakukan dalam rangka:

- a. keperluan lelang sitaan pajak;
- b. keperluan lelang barang-barang eks tegahan kepabeanan dan cukai;
- c. pengelolaan Barang Milik Negara dan/atau kekayaan daerah;
- d. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara;
- e. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah;
- f. pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya; atau
- g. pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penilaian, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah menggunakan analisis sesuai prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik (*The Highest and The Best Use*), analisis kelayakan bisnis dan analisis pasar properti, sehingga Penilai DJKN menghasilkan nilai yang akurat dan akuntabel. Dari uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Penilai DJKN mempunyai peran yang strategis dalam mendukung Pengelolaan Kekayaan Negara yang akuntabel.

### 3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara mempunyai peran strategis untuk melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Peran ini sangat mendukung peran strategis DJKN sebagai *revenue center* dari sisi biaya administrasi maupun pengurusan penagihan piutang negara.

### 4. Pelayanan Lelang

Lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Penjualan melalui lelang memberikan keuntungan bagi pihak masyarakat, instansi-instansi yang



membutuhkan yang mungkin berbeda dari sisi keperluan maupun pemerintah. Bagi Masyarakat, penjualan melalui lelang memberikan jaminan kepastian hukum atas barang-barang yang dibeli serta mendapatkan transaksi yang transparan dan efisien. Bagi instansi atau badan-badan usaha yang dilayani memberikan media untuk mendapatkan dana dalam waktu yang relatif cepat dengan harga yang maksimal, dengan tersedianya dana maka akan memperlancar arus lalu lintas perekonomian negara. Di samping itu, bagi pemerintah, lelang juga memiliki fungsi *budgeter* untuk mengumpulkan penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk bea lelang, PPh dan BPHTB guna membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Dengan demikian, pelayanan lelang mempunyai peranan yang sangat strategis karena merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara.

## BAB II

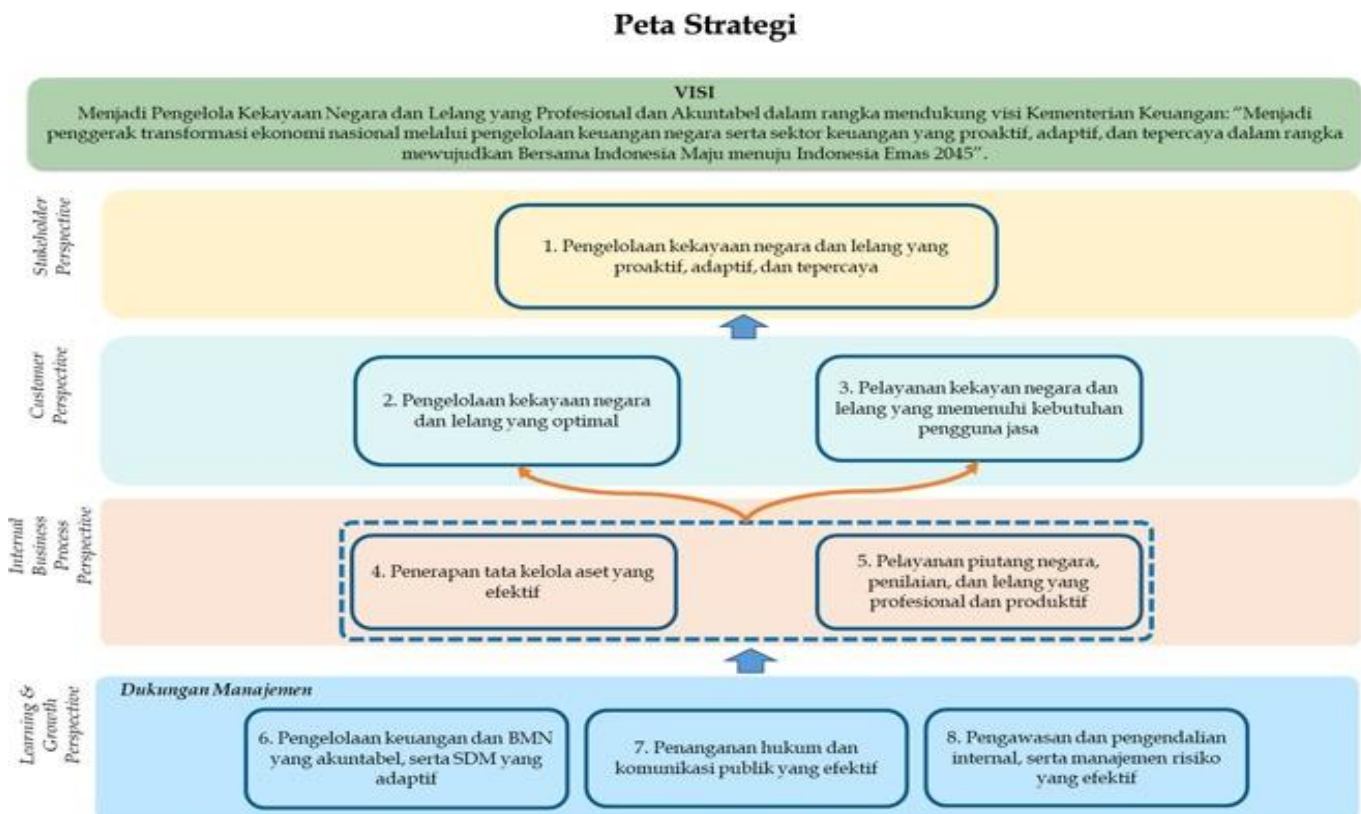
## PERENCANAAN KINERJA

## A. PETA STRATEGI DAN SASARAN STRATEGIS

## 1. Peta Strategi

Perencanaan kinerja KPKNL Bogor dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat dan Kepala KPKNL Bogor. Penandatanganan Kontrak Kinerja merupakan cerminan dari kesanggupan untuk meraih dan melampaui target yang telah ditetapkan serta menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan KPKNL Bogor sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun.

Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Bogor



Peta strategi KPKNL Bogor terdiri dari 4 (empat) perspective yaitu:

1) *Stakeholder Perspective*

*Prespective* yang berkaitan dengan stakeholder KPKNL Bogor dan untuk mengetahui kinerja KPKNL Bogor yang paling utama/pokok. *Stakeholder prespective* terdiri dari 1 (satu) sasaran

strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Tepercaya.

#### 2) *Customer Perspective*

*Perspective* yang berorientasi kepada pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Bogor adalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna jasa. *Customer perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Bogor yaitu Satuan Kerja K/L, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang.

#### 3) *Internal Business Process Perspective*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada *customer* dan *stakeholder*. *Internal business process perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu penerapan tata Kelola kekayaan negara yang efektif dan pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif.

#### 4) *Learning and Growth Perspective*

Merupakan sumber daya internal KPKNL Bogor yang dimiliki sebagai modal untuk untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif, penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen resiko yang efektif.

Kontrak Kinerja Kemenkeu Three KPKNL Bogor Tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

## 2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Adapun Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Bogor berjumlah 8 (delapan), yaitu:

- 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Tepercaya.
- 2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal.
- 3) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

- 4) Penerapan tata Kelola kekayaan negara yang efektif.
- 5) Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif.
- 6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif.
- 7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.
- 8) Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen resiko yang efektif.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut di atas, telah ditetapkan indikator atau tolak ukur keberhasilan pencapaiannya yaitu berupa Indikator Kinerja utama (IKU). IKU Kemenkeu Three KPKNL Bogor yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Antara Sasaran Strategis dengan IKU terdapat keterkaitannya, yaitu sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Daftar IKU KPKNL Bogor Tahun 2025

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya							
1a-CP	Indeks Integritas	100	1117	117	120	120	120	120
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	21%	55%	120%	120%	120%	120%	120%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	106,41	172,48	172,48	108,69	108,69	110,55	110,55
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	13%	36%	36%	75%	75%	105,83%	105,83%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	32,7%	60%	60%	84%	84%	110,84%	110,84%

3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	110	103,95	103,95	109,93	105,95	99,27	120
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	95,60	95,40	95,40	100	96,93	96,95	120
4	Penerapan tata Kelola kekayaan negara yang efektif							
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	881,8	182,1	182,1	120	120	160,95	120
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	120	120	120	120	120	120	120
5	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	115,5	122,3	122,3	115	115	113,9	113,9
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	114,3	111,5	111,5	112,6	112,6	113,5	113,5
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	41,5	190,3	190,3	108,3	108,3	140,8	140,8
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	120	120	120	120	120	120	120
6b-CP	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	120	120	120	120	120	120	120
6c-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	25,8	65,7	65,7	120	120	N/A	N/A
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	106	109	109	109	109	109	109



7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	N/A	115	115	118	116	116	116
8	Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen resiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan resiko	95,3	99,7	99,7	98,6	98,6	97,5	97,5
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam kelanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	120	120

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Perbandingan antara target IKU dengan realisasi IKU pada masing-masing perspektif diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bogor tahun 2025 adalah sebesar 116,05% (seratus enam belas koma lima persen).

Kinerja KPKNL Bogor tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini nampak adanya peningkatan NKO dari 113,13% (tahun 2023), 115,53% (tahun 2024) dan menjadi 116,05%. Selama tahun 2025, KPKNL Bogor memiliki 19 (Sembilan belas) IKU dan pada akhir tahun seluruh IKU status hijau.

Secara keseluruhan, Capaian Kinerja IKU Kemenkeu-Three KPKNL Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKU KPKNL Bogor Tahun 2025

Seksi KI	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Po/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	117	117	120	120	120	120	
Capaian	100	117	117	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi
Indeks Integritas dikeluarkan oleh Kantor Pusat tiap Triwulan
Saat ini masih dilakukan penyampaian data/dokumen yang dibutuhkan baik melalui nota dinas maupun melalui aplikasi, atau komponen penilaian lainnya.

Seksi PKN, PN dan JF Pelelang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Po/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	177,59%	157,22%	157,22%	179,78%	179,78%	128,96%		
Capaian	21%	55%	55%	120%	120	120	120	

**Isu Utama dan Implikasi**

Target Total : Rp101.418.672.000 >> ADENDUM Rp84.805.668.333  
 PKN : Rp69.683.255.000 >> ADENDUM Rp55.050.000.000  
 PN : Rp96.063.000 >> ADENDUM Rp79.300.000  
 Lelang : Rp31.639.354.000 >> ADENDUM Rp29.676.368.333

Realisasi s.d TW IV 2025 : Rp125.007.359.821  
 PKN : Rp 86.184.230.910  
 PN : Rp 152.190.060  
 Lelang : Rp **44.450.934.578**

Seksi PKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Po/KP
Target	50	60	60	80	80	100	100	
Realisasi	106,41%	103,49%	103,49%	108,69%	108,69%	110,55%	110,55%	
Capaian	106,41%	172,48%	172,48%	108,69%	108,69%	<b>110,55%</b>	<b>110,55%</b>	

**Isu Utama dan Implikasi**

Total NUP BMN Target (BMN Dengan Persentase Kesesuaian s.d. 50%) = 267  
 Target NUP 2025 = 67

Target Q4: 100%

Realisasi sd. TW IV 2025:

- Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan = 52
- Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan = 15
- Total NUP = 67

Jafung Pelelang	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Po/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	116,93%	82,52%	82,52%	92,97%	92,57%	<b>105,83%</b>		
Capaian	13%	36%	36%	75%	75%	<b>105,83%</b>		

**Isu Utama dan Implikasi**

Target Tahunan  
 PL Kelas I : Rp875.062.000.000  
 Pegadaian : Rp278.882.500.000  
 Jumlah target : Rp1.153.944.500.000

Realisasi s.d. Desember 2025:  
 PL Kelas I: Rp972.690.902.285  
 Pegadaian: Rp248.502.431.700  
 Jumlah Realisasi: Rp1.221.193.333.985



Seksi PN	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Po/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	130,96%	117,90%	117,90%	110,47%	110,47%	110,84%	110,84%	
Capaian	32,7%	60%	60%	84%	84%	110,84%	110,84%	

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target Tahunan : Rp 7.800.000.000</p> <p>Realisasi sd. Desember 2025: Rp 8.645.302.353,73</p>

Seksi PN dan Jafung Pelelang	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Po/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	
Realisasi	110	97,91	97,91	109,93	105,95	99,27	99,27	
Capaian	110	103,95	103,95	109,93	105,95	99,27	120	

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target Tahunan: 74</p> <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lelang: 98,67</li> <li>- PN: 99,86</li> </ul> <p>Realisasi sd November: 99,27</p>

Seksi PN dan Jafung Pelelang	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Po/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	
Realisasi	95,60	95,20	95,20	100	96,93	97	97	
Capaian	95,60	95,40	95,40	100	96,93	96,95	120	

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target Tahunan: 77</p> <p>Capaian Desember = 97</p> <p>Capaian sd Triwulan IV = 96,95 (capaian Q4)</p>



Seksi PKN	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	46,19%	72,86%	72,86%	71,90%	71,90	160,95%	160,95%	
Capaian	881,8%	182,14%	182,14%	120%	120%	<b>160,95%</b>	<b>120</b>	

Isu Utama dan Implikasi
<p>Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan</p> <p>Target : 100%</p> <p>210 bidang</p> <p>Q1 : 11; Q2 : 84; Q3 : 126; Q4 : 210</p> <p>K1: 101</p> <p>K2: 2</p> <p>K3: 107</p> <p>K4: 0</p> <p>Realisasi sd. Triwulan IV 2025:</p> <p>K1: 162</p> <p>K2: 1</p> <p>K3: 101</p> <p>K4: 74</p> <p>Realisasi sd. Desember 2025: 338 bidang</p>

Seksi PKN	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	22,77%	75,12%	75,12%	90,11%	90,11%	120%	120%	
Capaian	120	120	120	120	120	<b>120%</b>	<b>120</b>	

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target Tahunan :</p> <p>Komponen A: 437</p> <p>Komponen B: 22</p> <p>Realisasi sd. Triwulan IV 2025:</p> <p>Komponen A: 550 NUP</p> <p>Komponen B: 207 NUP</p>

Seksi PN	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	115,50%	122,38%	122,38%	115%	115%	113,93%	113,93%	
Capaian	115,50%	122,38%	122,38%	115%	115%	<b>113,93%</b>	<b>113,93%</b>	

**Isu Utama dan Implikasi**

Target Tahunan : 140

Target:

Q1: 40

Q2: 80

Q3: 110

Q4: 140

Target Berkas PN Triwulan IV: 140

Realisasi sd. Desember 2025:

1. Penyelesaian Berkas PN melalui PUPN yang menghasilkan PNBPN: 0

2. Penyelesaian Berkas PN melalui PUPN yang tidak menghasilkan PNBPN: 145

3. Penyelesaian Berkas PN yang tidak dapat diserahkan ke PUPN: 0

Jafung Penilai Pemerintah	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	
Realisasi	114,32%	111,58%	111,58%	112,64%	112,64%	113,51%	113,51%	
Capaian	114,32%	111,58%	111,58%	112,64%	112,64%	<b>113,51%</b>	<b>113,51%</b>	

**Isu Utama dan Implikasi**

a. Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)

b. Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)

c. Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)

Realisasi sd Desember 2025:

Komponen A = 115,03%

Komponen B = 100%

Komponen C = 125%

Jafung Pelelang	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Pol/KP
Target	30	40	40	70	70	80	80	
Realisasi	41,52%	76,15%	76,15%	108,32%	108,32%	<b>140,88%</b>		
Capaian	41,52%	190,38%	190,38%	108,32%	108,32%	<b>140,88%</b>		

**Isu Utama dan Implikasi**

a. Rata-rata capaian Lot Lelang Laku (40%)

b. Persentase Frekuensi Lelang (60%)

Realisasi sd Triwulan IV 2025: **140,88%**



Subbag Umum dan Jafung Pranata Keuangan	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indeks Kinerja Kualitas Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target Tahunan: 100</p> <p>Realisasi sd. Desember 2025:                      Nilai IKPA : 100                      Nilai SMART : 100 (nilai pada aplikasi masih proses updating)</p>

Subbag Umum	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target Tahunan: 100</p> <p>Realisasi sd. Desember 2025: 120</p>

Subbagian Umum	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	PoI/KP
Target	20	40	40	60	60	80	80	
Realisasi	25,81%	120%	120%	86,00	86,00	N/A		
Capaian	25,81%	65,75%	65,75%	120%	120%	N/A		

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target Tahunan: 80</p> <p>Target Q4 : 80</p> <p>Realisasi sd. Bulan Desember 2025:                      Bintang: 100%                      Survey : nilai hasil survey masih diposes oleh Biro SDM                      Sinergi antar Generasi : 120                      Diklat: 100% memenuhi</p>



Seksi HI	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Juni (Q2)	SM. I	Sept (Q3)	s.d. Q3	Desember (Q4)	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	106	109	109	109	109	109	109	
Capaian	106	109	109	109	109	109	109	

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target : 100  Realisasi : 109,69 (sebelumnya 110,07)</p> <p>Realisasi Komponen A (80%): 109,09 (sebelumnya 109,68)  Total indeks perkara = 8.995 (sebelumnya 7.645)  Jumlah perkara = 97 (sebelumnya 82)  Nilai indeks komponen A = 92,73 (sebelumnya 93,23)</p> <p>Realisasi Komponen B (20%): 112,09 (sebelumnya 111,63)  Total indeks putusan = 17.050 (sebelumnya 10.750)  Jumlah putusan = 169 (sebelumnya 107)  Nilai indeks komponen B = 100,88 (sebelumnya 100,46)</p>

Seksi HI	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Desember	Y-23	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	115	115	115	118	116	116		
Capaian	N/A	115	115	118	116	116		

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target : 80  Realisasi Desember : 118  Realisasi TW IV: 116</p> <p>Perhitungan IKU atas 3 komponen yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan (Capaian: 120 )</li> <li>2) Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik (Capaian: 120) dan</li> <li>3) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website (Capaian: 100)</li> </ol>

Subbagian Umum, Seksi KI	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	95,36	99,73	99,73	98,61	98,61	97,51		
Capaian	95,36	99,73	99,73	98,61	98,61	97,51		

**Isu Utama dan Implikasi**

- a. Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi (30%)
- b. Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai (30%)
- c. Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%)

Realisasi sd. Triwulan IV 2025 :

Manajemen Kinerja Pegawai : **99,55 (nilai estimasi, dalam proses finalisasi oleh Kanwil)**

Manajemen Kinerja Organisasi : N/A

Manajemen Kinerja Risiko : N/A

Nama Unit	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI- WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	September	s.d. Q3	Desember	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	100	100	130,52	130,52	
Capaian	100	100	100	100	100	120	120	

**Isu Utama dan Implikasi**

Realisasi TW IV = Indeks Komponen IV

Bagi unit tanpa catatan fraud ( Nilai LKE x Koefisien Tingkat Monev ZI ) + Faktor Apresiasi/Koreksi Koefisien Level Pembangunan ZI sebagai berikut:

WBBM = 1

WBK = 0,95 Kriteria Faktor Apresiasi/Koreksi pada Monev WBBM sebagai berikut:

-- 10 : apabila berpredikat Keberlanjutan ZI

-- 0 : apabila mendapat Peringatan I Kriteria Faktor Apresiasi/Koreksi pada Monev WBK sebagai berikut:

-- 10 : apabila berpredikat Keberlanjutan ZI

-- -17,5 : apabila mendapat Peringatan I

Bagi unit dengan catatan fraud Indeks komponen IV diperoleh berdasarkan hasil akhir monev keberlanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keberlanjutan ZI = 115

Peringatan II = 97,5

Peringatan III = 95

Usulan Pencabutan = 90

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Realisasi		
		2025	2024	2023
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya			
1a-CP	Indeks Integritas	120	92,44	89,17
1b-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	128,96%	141,75%	120,92%

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	110,55%	115,61%	106,31%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	105,83%	125,25%	101,85%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	110,84%	113,76%	117,12%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	99,27	-	-
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	97	-	-
4	Penerapan tata Kelola kekayaan negara yang efektif			
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	160,95%	207,47%	171,24%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	120%	125,74%	133,40%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif			
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	113,93%	77,27%	105%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	113,51%	109,08	-
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	140,88%	131,47%	128,47%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	120	120%	116,02%
6b-CP	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	120	-	-
6c-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	N/A	119,6%	115%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	109,69	-	-

7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	116	100	-
8	Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen resiko yang efektif			
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	97,5	99,58	-
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam kelanjutan pembangunan ZI-WBK/ WBBM	130,52	-	-

## B. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2025 KPKNL Bogor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.405.768.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase
Belanja Modal	87.225.000	82.155.000	94,18
Belanja Barang	3.318.543.000	3.165.318.259	95,38
Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.405.768.000</b>	<b>3.247.473.259</b>	<b>95,35</b>

\*) Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) BOGOR pada tahun 2025 secara umum dapat dikatakan sangat baik dengan capaian kinerja keseluruhan (Nilai Kinerja Organisasi/NKO) sebesar 116,05% dengan katagori sangat baik.

Tabel 4.1 Capaian KPKNL Bogor Tahun 2025

Perspective	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	36%
Customer	20%	23,19%
Internal Process	25%	29,79%
Learning and Growth	25%	27,06%
NKO		116,05%

Dalam mencapai target kinerja, KPKNL Bogor menghadapi banyak tantangan, kendala dan permasalahan. Hal tersebut dapat dilalui dengan segala upaya dan rencana aksi yang telah dilaksanakan sehingga realisasi capaian kinerja dapat melampaui targetnya. KPKNL Bogor juga telah melaksanakan berbagai kegiatan penting selama tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dan semoga dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* KPKNL Bogor. Saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja KPKNL Bogor di masa yang akan datang. Pada akhirnya, KPKNL Bogor belum berpuas diri atas capaian yang sudah ada dan akan terus berusaha melakukan upaya perbaikan diri terutama dalam hal peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder*.



## LAMPIRAN

### Daftar Kegiatan yang Dilaksanakan KPKNL Bogor Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Portal Lelang Indonesia Gen 2	Bulan Februari	KPKNL Bogor
2.	Sosialisasi Percepatan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Bulan Mei	KPKNL Bogor
3.	Asistensi Likuidasi Satker Terdampak Kabinet Merah Putih	Bulan Juli	KPKNL Bogor
4.	Qurban Idul Adha	Bulan Juni	KPKNL Bogor
5.	Mendapat Kunjungan dari Wakil Menteri	Bulan Oktober	KPKNL Bogor
6.	Tuan Rumah Rakernas DJKN	Bulan November	KPKNL Bogor
7.	Tuan Rumah Forum Kepala Bagian Umum DJKN	Bulan November	KPKNL Bogor
8.	Kunjungan Walikota Sukabumi membahas Optimalisasi Aset Daerah	Bulan Desember	KPKNL Bogor
9.	Tali Kasih DJKN	Bulan Desember	KPKNL Bogor

## Daftar Penghargaan/Achievement KPKNL Bogor Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1.	Satker dengan Nilai Terbaik IKPA Terbaik (100) pada 5 Indikator dengan Bobot 80%	KPPN Bogor	KPKNL Bogor
2.	Pegawai Teladan Lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat a.n. M. Affid Diena	Kanwil DJKN Jawa Barat	KPKNL Bogor

